

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan pangan, manusia mendapatkan asupan energi dari makanan yang dikonsumsinya. Salah satu keberhasilan suatu negara adalah tercukupinya ketersediaan pangan bagi warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan utama yang merupakan hak asasi manusia dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Codexindonesia.bsn.go.id, 2017).

Kebutuhan pangan manusia umumnya meliputi kebutuhan karbohidrat yang dapat diperoleh dari beras, umbi, sagu, gandum dan sebagainya dan kebutuhan protein hewani maupun nabati serta kebutuhan serat, vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. (Badan Ketahanan Pangan DIY, 2015). Tidak tersedianya bahan pangan (defisit bahan pangan) disuatu daerah berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, karena permintaan tidak didukung dengan suplai yang ada. Hal ini jika terus berlangsung akan menyebabkan ketidakstabilan di tingkat nasional (Malik, 2014).

Pemerintah berupaya memenuhi ketersediaan pangan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dengan berbagai cara, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengimpor bahan pangan pokok yaitu beras. Tercatat Indonesia pada periode januari hingga november 2016 telah mengimpor beras sebanyak 1.197 ton dengan nilai rupiah sebesar Rp 6,4 triliun, jumlah

tersebut naik dibandingkan periode sebelumnya dengan kenaikan sebesar 47 %. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mencukupi kebutuhan pangan penduduk dan mencegah dari kenaikan harga bahan pangan (Kumparan.com, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Bulog, 2012).

Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah daerah tahan pangan yaitu tersedianya lahan pertanian untuk menunjang produksi pangan bagi penduduknya, hal ini sering dikaitkan dengan kemandirian pangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pada pasal satu ayat 4 bahwa :

“Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.”

Perkembangan pembangunan di suatu wilayah semakin pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan industri perekonomian (non

pertanian), hal ini menyebabkan daerah pinggiran kota terus mengalami alih fungsi lahan pertanian (Antasari, 2008).

Pertumbuhan penduduk (jiwa) yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama pada Kabupaten Sleman dan Bantul. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 2010 - 2016

Tahun	Kabupaten Kota (jiwa)				
	Kulon Progo	<b>Bantul</b>	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta
2010	389.661	<b>909.539</b>	677.376	1.103.534	387.379
2015	412.198	<b>971.511</b>	715.282	1.167.481	412.704
2016	416.683	<b>983.527</b>	722.479	1.180.479	417.744
Laju 2010 – 2016 (%)	1,12	<b>1,31</b>	1,08	1,13	1,27
Laju 2015 – 2016 (%)	1,09	<b>1,24</b>	1,01	1,11	1,22

DIY dalam angka, BPS 2017

Berdasarkan tabel 1, Kabupaten Bantul selama 6 tahun terakhir menduduki peringkat laju pertumbuhan tertinggi, terhitung sejak 2010 hingga 2016 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul mencapai 1,31 persen. Sementara itu pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu satu tahun sejak tahun 2015 ke tahun 2016, Kabupaten Bantul kembali menempati urutan laju pertumbuhan tertinggi dengan angka 1,24 persen.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi yaitu Kecamatan Kasihan. Berdasarkan data statistik Kabupaten Bantul dalam angka 2017, Kecamatan Kasihan memiliki laju pertumbuhan tertinggi ke dua setelah Kecamatan Banguntapan. Dari periode tahun 1990 hingga tahun 2000, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kasihan memiliki

presentase sebesar 2,45% dan pada periode tahun 2000 hingga tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kasihan naik menjadi 2,47% (BPS Bantul, 2016).

Sementara itu, data alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 ke tahun 2009 berdasarkan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian meningkat, terlihat lahan kampung mengalami peningkatan sebesar 40,65 ha, sedangkan luas lahan sawah dan tegalan mengalami pergeseran 40,59 ha. (Perda Bantul, 2010). Dikutip dari surat kabar tribun jogja yang terbit pada 21 September 2016, bahwa Kabupaten Bantul mengalami penurunan lahan hijau produktif sebesar 40 hektare per tahun sejak tahun 2014. (Jogja.tribunnews.com, 2016). Di Kecamatan Kasihan tercatat luas lahan sawah pada periode tahun 1986 hingga tahun 2016, telah mengalami penurunan sebesar 429 hektar atau 14,3 hektar per tahun (BPS Bantul, 2017).

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang berlokasi di daerah pinggiran kota (*sub urban*), wilayah tersebut menjadi daerah perluasan untuk kota dan perkembangan kawasan pemukiman dan industri. Sehingga, di Kecamatan Kasihan banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kecamatan Kasihan menempati urutan ke tiga kecamatan terpadat setelah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon (Bantul.Kab, 2017).

Salah satu kecamatan yang diindikasikan sebagai kecamatan rawan pangan di Kabupaten Bantul berdasarkan aspek ketersediaan adalah Kecamatan Kasihan, dalam penelitian ketahanan pangan wilayah Kabupaten Bantul kondisi ketersediaan pada Kecamatan Kasihan dalam kondisi waspada (BKPP DIY,

2015), hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya sekitar 16 %, angka ini merupakan angka terkecil dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul (Bantulkab.com 2017). Dengan minimnya sumber daya manusia di sektor pertanian, maka akan berdampak pada jumlah produksi pangan di Kecamatan Kasihan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan tingkat desa berdasarkan aspek ketersediaan pangan dengan melihat laju alih fungsi lahan serta kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi normatif penduduk per desa dari tahun 2007 hingga 2016 di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis laju alih fungsi lahan pertanian tingkat desa dari tahun 2007 ke tahun 2016 di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan tingkat desa dari tahun 2007 ke tahun 2016 di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
3. Menganalisis pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan pangan tingkat desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah setempat dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dan program kerja pemerintahan di waktu yang akan datang, serta dapat mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan. Sementara bagi pembaca, penelitian ini berguna sebagai wawasan atau sebagai referensi penelitian sejenis.